



Alternatif Investasi Buat Yang Kelebihan Dana

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Menjadi alternatif bagi perbankan syariah untuk menyalurkan kelebihan dana. Perbankan syariah kini bisa menerima dana-dana dari Timur Tengah.

PELAKU ekonomi syariah, selama ini kesulitan menyalurkan dananya dalam bentuk obligasi atau surat utang negara berbasis syariah. Sebelumnya pemerintah pun tak bisa menerbitkan obligasi negara syariah itu karena tak ada payung hukumnya. Namun kini, ganjalan itu sudah tak ada lagi. DPR akhirnya menyetujui UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU itu selanjutnya diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei lalu.

Dengan munculnya UU SBSN itu, baik pemerintah maupun pelaku ekonomi syariah menjadi girang. Pemerintah bisa menerbitkan obligasi syariah. Dana yang diperoleh bisa

dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedangkan pelaku ekonomi syariah bisa menyalurkan dananya ke SBSM yang dalam bahasa syariah biasa disebut dengan sukuk negara.

Model kerja sukuk negara mirip dengan obligasi (surat utang) konvensional. Namun ada perbedaan mendasar di antara kedua. Bila obligasi pada umumnya memberikan imbalan kepada pembelinya dalam bentuk bunga, sukuk mengharamkan bunga, karena termasuk sebagai riba. Selain tak boleh memberikan bunga atau riba, sukuk harus berbasis transaksi (*underlying transaction*). "Sukuk harus untuk membiayai proyek riil dan harus berbasis agunan atau *underlying assets*," kata Siti Ch Fadjrijah, Deputy Gubernur Bank



Djoko Retnadi, pengamat perbankan



Deputi BI, Siti Ch Fadrijah.



Direktur Utama Bank Jatim, Muljanto

Indonesia.

Siti Ch Fadrijah memberi contoh, misalnya pemerintah hendak membangun unit gedung baru di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pemerintah bisa menggalang dana dengan menerbitkan sukuk. Agunannya adalah Gedung RSCM beserta dengan kasnya.

Ramzi A Zuhdi, direktur perbankan syariah Bank Indonesia menyatakan UU SBSN akan mendorong industri syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah. "Produk syariah bisa tumbuh dengan cepat, sebab selama ini masih sangat sedikit produk syariah untuk investasi," katanya. Ramzi menambahkan, selama ini banyak bank-bank syariah di Indonesia yang menolak dana dari Timur Tengah yang masuk karena tak bisa menyalurkan dana tersebut.

Dana-dana dari Timur Tengah yang mau masuk ke Indonesia sebagian memang mau ditanamkan dulu ke perbankan syariah untuk selanjutnya disalurkan ke ladang bisnis syariah. Namun banyak pula dana Timur Tengah lainnya yang mau masuk ke sini tidak lewat perbankan syariah, tetapi langsung ke lahan investasi syariah. Dana-dana inilah yang nantinya akan masuk ke obligasi syariah.

Djoko Retnadi, pengamat

perbankan menyatakan bahwa sebetulnya kalau berbicara mengenai SBSN dan perbankan syariah, hubungannya masih relatif kecil. "Sebetulnya pemerintah menerbitkan sukuk, bukan dalam rangka memberikan fasilitas bagi bank syariah," kata dia. Tujuan utamanya adalah mendiversifikasi sumber pendanaan. Dalam arti akan menggali potensi bank syariah tidak hanya di dalam negeri, dan yang lebih penting adalah investor dari luar negeri.

Karena sekarang ini hampir semua pemilik dana di negara-negara Teluk (Arab), selalu siap berinvestasi terutama di Indonesia. Mereka tidak tertarik dengan yield (imbal hasil), atau suku bunga tinggi, tapi investasi yang berbentuk syariah. Di negara-negara Timur Tengah itu, banyak lembaga-lembaga yang memiliki uang banyak seperti dana pensiun, dana kerajaan. Untuk menginvestasikan dana itu, UU di sana membatasi hanya dalam bentuk syariah.

Sedangkan bagi perbankan syariah, adanya SBSN itu bisa menjadi *exit strategy*. "Sehingga bisa lebih optimum dan islami," kata Djoko. Namun, sebenarnya kalau dilihat dari fungsi bank, Djoko tidak sependapat kalau bank syariah menginvestasikan dananya ke dalam sukuk. "Ini sedikit

menyalahi khittah atau eksistensi bank syariah yang seharusnya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan," ia menambahkan.

Bagi BPD syariah, Djoko menyarankan agar melupakan dulu investasi di sukuk. Sebab, BPD harus lebih fokus dalam membiayai kredit di daerah. "Saya kira lupakan dulu sukuk dan fokus untuk pembiayaan," kata dia. "Jangan sampai belum fokus ke *financing*, sudah terganggu dengan pilihan-pilihan investasi lain sehingga menjadi tidak fokus eksistensi bank syariah," ia menambahkan.

Muljanto, Direktur Utama Bank Jatim setuju bahwa fokus penyaluran dana bank, termasuk unit syariah di BPD adalah ke sektor kredit. Toh begtu, keluarnya UU SBSN patut disambut gembira. "Ini jadi alternatif bagi bank syariah untuk memanfaatkan kelebihan atau kekurangan dana dan barangkali akan menjadi instrumen yang *liquid*," kata dia. Saat kelebihan dana dibelikan sukuk, saat kekurangan dana, sukuk bisa dicairkan. "Kalau di BPD syariah ada kelebihan dana *kan* tidak ada SBI syariah *kan*," ia menambahkan. Penempatan di sukuk juga lebih menguntungkan daripada penempatan dana antar bank syariah. ●